

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS**

**Wisnu Aji**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail: wisnu9221@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih terdapat beberapa permasalahan seperti tidak adanya kejelasan mengenai output yang dihasilkan dari retribusi pasar, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang retribusi pasar seperti komputer dan printer dan juga fasilitas pasar seperti WC dan musholla, dan UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari kurang memiliki ketegasan dalam menarik retribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang, diantaranya 3 orang pegawai UPTD dan 4 orang Pedagang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian ini dilatar belakangi bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ni belum berjalan dengan optimal. Masih adanya dimensi yang belum sesuai dengan pelaksanaannya seperti kurangnya kejelasan mengenai maksud dan tujuan ditariknya retribusi pasar, sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam penarikan retribusi pasar, dan kurangnya ketegasan pegawai dalam melakukan penarikan retribusi pasar kepada pedagang sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang

dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), actor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk

bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Langkah seperti ini bertujuan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan dapat terkendali. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan tersebut secara keseluruhan dapat dicapai.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah diperlukan kebijakan yang mengatur berbagai macam tingkah laku didalamnya dengan tujuan agar apa yang menjadi tujuan bagi pembuat kebijakan dapat tercapai. Setiap daerah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan membutuhkan suatu kebijakan sebagai usaha untuk mendapatkan pendapatan sendiri atau biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tempat yang bisa dijadikan objek pendapatan suatu daerah adalah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Asli Daerah juga diperoleh salahsatunya dari retribusi pasar yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diberlakukan kepada:

a. Pedagang kios yang mempunyai izin penggunaan Kios;

b. Pedagang los yang mempunyai izin pengguna Los;

c. Pedagang pelataran yaitu selain pedagang kios dan los yang berada di lingkungan pasar.

Pedagang sebagai subjek dari retribusi pasar memiliki pengaruh dalam efektivitas penerimaan. Retribusi daerah hanya diperuntukan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah seperti para pedagang di pasar. Dengan kata lain, jika semakin banyak orang yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah daerah maka penerimaan daerah dari retribusi akan meningkat. Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan oleh suatu daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis terlihat bahwa implementasi kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar belum optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi mengenai tujuan dan manfaat retribusi dari pihak UPTD Pasar kepada pedagang di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih kurang tersampaikan. Contoh: kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD kepada pedagang.
2. Kelengkapan sarana prasarana pasar masih belum optimal.

Contoh: sarana ibadah (mesjid/mushola) dan toilet untuk pedagang maupun pengunjung pasar serta peralatan komputer dan printer yang belum tersedia dan kurang layak.

3. Kurangnya ketegasan dari petugas penarik retribusi pelayanan pasar UPTD Pasar Wilayah Banjarsari dalam melaksanakan kebijakan wajib retribusi kepada pedagang yang tidak/ belum membayar retribusi pelayanan pasar tepat pada waktu yang ditentukan. Contoh: banyaknya pedagang yang menghutang baik pengguna kios maupun los.

Maka dari itu berdasarkan uraian pada latar belakang peneliti berpendapat bahwa kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari sehingga penarikan retribusi pasar dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Implementasi merupakan proses dalam perumusan kebijakan dengan berbagai usaha yang dilakukan

sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya. Menurut Fajar Gifari (2015: 39) “Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas”. Dalam kaitannya dengan proses implementasi, Van Meter dan Van Horn (Solichin, 2014: 135) berpendapat bahwa: ‘Proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.’

Menurut Edward III (Syahrudin, 2019:27) ‘Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya’. Secara umum implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat implementasi yang dijalankan dengan baik. Untuk dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya model-model implementasi sebagai suatu rumus dalam keberhasilan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2019: 136-137) yang berpendapat bahwa ‘Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan yaitu (i) Komunikasi, (ii) Sumberdaya, (iii) Disposisi, dan (iv) Struktur Birokrasi.’

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah tindakan seseorang untuk dapat bisa menyampaikan maksud yang diinginkan. Edward menjelaskan bahwa dalam komunikasi terdapat 3 hal penting, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Edward III (Agustino, 2019: 137) mengemukakan bahwa:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

### 2. Sumberdaya

Menurut Tangkilisan (2003: 85) “Sumberdaya adalah kritis bagi implementasi kebijakan efektif. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan yang ada akan membuat terjadinya penyimpangan.”

Menurut Edward III (Agustino, 2019: 138) dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staff; Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang; Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

### 3. Disposisi

Agustino (2019: 139) mengemukakan bahwa “Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.”

### 4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang perlu dilakukannya dan mempunyai sikap untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat benar-benar terealisasi dengan sempurna karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Retribusi pasar merupakan bentuk dari retribusi jasa umum. Retribusi pasar merupakan pungutan yang diberikan kepada para pedagang sebagai objek retribusi oleh pemerintah daerah. Pungutan tersebut didasarkan atas pemakaian tempat-tempat seperti pertokoan, kios-kios, los dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah di wilayah pasar yang dimiliki pemerintah daerah. Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang termasuk kedalam retribusi jasa umum dan juga bagian dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tiap daerah mempunyai kebijakan untuk mengatur sendiri bagaimana pengelolaan retribusi daerahnya khususnya retribusi pasar.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 orang Kepala UPTD Pasar Kecamatan Banjarsari, 2 orang

pegawai/penarik retribusi pasar UPTD Pasar Kecamatan Banjarsari, dan 4 orang perwakilan pedagang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat ditinjau sebagaimana diungkapkan oleh George C. Edward III (Agustino, 2019:136-141) yaitu dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan bentuk penyampaian pesan yang ditujukan kepada seseorang untuk mencapai tujuannya. Komunikasi perlu disampaikan dengan baik agar tidak terjadi adanya salah pengertian (*miss-communication*). Dalam penyampaian komunikasi diperlukan agar setiap pesan yang disampaikan terkait dengan kebijakan dapat sepenuhnya terlaksana tanpa adanya kendala apapun. Hasil penelitian pada dimensi komunikasi masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum jelasnya informasi yang disampaikan oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari kepada pedagang terkait maksud dan

tujuan dari penarikan retribusi pasar. Output yang dihasilkan masih belum jelas seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan para pedagang. Selain itu, banyaknya pedagang baru membuat informasi tidak sepenuhnya tersampaikan dengan baik. Maka dari itu diperlukan upaya yaitu melakukan sosialisasi rutin secara menyeluruh berkaitan dengan maksud dan tujuan ditariknya retribusi pasar sehingga pedagang tau output dari retribusi pasar kedepannya untuk apa.

Hasil observasi pada dimensi komunikasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, dimana masih ditemukannya hambatan-hambatan seperti tidak adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan ditariknya retribusi pasar kepada pedagang. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Edward III (Agustino, 2019: 137) mengemukakan bahwa:

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, observasi dan teori ahli menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian proses

komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari karena dalam kenyataannya pegawai UPTD belum bisa menyampaikan informasi tentang maksud dan tujuan ditariknya retribusi pasar secara jelas dan dipahami oleh pedagang.

## **2. Sumberdaya**

Dalam mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, diperlukan pula sumberdaya yang memadai. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumberdaya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena pada dasarnya, manusia yang menggerakkan semua sumberdaya agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai sepenuhnya. Selain itu, dalam implementasi kebijakan diperlukan sumberdaya seperti sarana dan prasarana (fasilitas) untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian pada dimensi sumberdaya sejauh ini belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia di Pasar Kecamatan Banjarsari dan juga untuk menunjang penarikan retribusi pasar seperti tidak tersedianya komputer dan printer yang berfungsi dengan baik. Menanggapi hal tersebut maka diperlukan upaya yaitu memaksimalkan penggunaan biaya retribusi untuk pengadaan sarana dan prasarana pasar yang lebih penting seperti pengadaan fasilitas untuk

penarikan retribusi pasar dan juga pengadaan kios dan los. Untuk pengadaan fasilitas seperti WC dan mushola, pihak UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari melakukan kerjasama dengan SMK Muhammadiyah sehingga fasilitas tersebut layak untuk digunakan bersama baik untuk para siswa maupun pengunjung pasar atau pedagang.

Hasil observasi pada dimensi sumberdaya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, Sehingga ditemukannya hambatan seperti masih banyaknya fasilitas pasar yang tidak lengkap dan sarana penunjang retribusi pasar seperti komputer dan printer yang tidak memadai untuk dipakai.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino,2019:139) mengemukakan bahwa:

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, observasi dan teori menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dimensi sumberdaya dalam implementasi kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari. Karena dalam kenyataannya

masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan sarana dan prasana baik untuk menunjang kebutuhan retribusi pasar maupun untuk fasilitas pasar yang ada seperti WC dan mushola. Maka dari itu UPTD Pasar Wilayah Banjarsari perlu memaksimalkan biaya retribusi pasar untuk pengadaan sarana dan prasarana pasar dan bekerja sama dengan pihak sekolah yaitu SMK Muhammadiyah dengan memanfaatkan mushola dan WC yang ada.

### **3. Disposisi**

Dalam disposisi, diperlukan adanya sikap dari para implementor untuk memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi kebijakan pasti terdapat beberapa masalah seperti adanya masalah kecenderungan untuk malas dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian pada dimensi disposisi sejauh ini belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan pegawai UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari dalam menagih atau menarik retribusi pasar kepada pedagang kios dan los. Hal ini dikarenakan pegawai UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari merasa simpati kepada para pedagang sehingga membiarkan para pedagang untuk menghutang dengan catatan harus dibayar. Hal ini mengakibatkan banyaknya pedagang yang menghutang baik pemilik kios maupun los. Menanggapi hal tersebut maka diperlukan upaya seperti selalu

melakukan penagihan kepada pemilik kios dan los yang menghutang agar tetap membayar retribusi pasar sehingga dalam pelaporan tahunan yang dicatat oleh UPTD Pasar bisa terpenuhi.

Hasil observasi pada dimensi disposisi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, sehingga ditemukannya hambatan seperti tidak adanya ketegasan dari pegawai UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari dalam melakukan penarikan retribusi pasar kepada pedagang kios dan los. Sehingga banyak dari mereka yang menghutang yang dimana dalam Kebijakan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, memang diperbolehkan untuk mencicil, namun tidak untuk menghutang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2019: 139) adalah:

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, observasi dan teori menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dimensi disposisi

dalam implementasi kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari. Karena dalam kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam ketegasan pegawai saat menarik retribusi pasar kepada pedagang kios dan los sehingga banyak yang menghutang. Maka dari itu UPTD Pasar Wilayah Banjarsari perlu bersikap tegas dalam menarik retribusi dan melakukan penagihan secara terus menerus kepada pedagang yang menghutang.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi yang menjadi pelaksana sebuah kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang sudah diputuskan melalui jalan koordinasi dengan baik. Setiap anggota birokrasi dalam struktur birokrasi harus mampu menjalankan tugasnya sesuai bidangnya. Setiap keputusan yang diambil harus mampu dilaksanakan secara maksimal oleh setiap anggota birokrasi sebagai implementor kebijakan. Hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi sejauh ini sudah berjalan dengan optimal. Dilihat dari adanya pembagian tugas yang jelas yang dilakukan oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari dengan membagi para penarik retribusi pasar sesuai dengan blok yang ada. Selain itu, SOP sudah dijalankan dengan baik sehingga dalam penarikan retribusi, setiap pegawai sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan beban tugas yang diberikan.

Hasil observasi pada dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan optimal, hal ini dilihat dari adanya pembagian tugas pada proses penarikan retribusi pasar kepada pedagang. Selain itu, SOP sudah dijalankan dengan baik oleh para pegawai UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar sehingga tidak ditemukan hambatan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2019:141) 'Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik'.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, observasi dan teori menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dimensi struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar oleh UPTD Pasar Wilayah Banjarsari. Sehingga dalam kenyataannya tidak ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terhadap proses implementasi kebijakan sehingga hal ini perlu dipertahankan supaya penarikan retribusi bisa berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi

Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Di Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan efektif dilihat dari dimensi yang dijadikan alat ukur masih terdapat dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya kejelasan dalam menyampaikan informasi mengenai maksud dan tujuan dari ditariknya retribusi pasar sehingga output yang dihasilkan masih dipertanyakan bagi para pedagang, belum adanya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk kebutuhan retribusi pasar seperti komputer dan printer maupun untuk fasilitas pasar seperti ketersediaan WC dan mushola, dan kurangnya ketegasan dari pegawai UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari dalam menarik retribusi pasar kepada pedagang sehingga banyak pedagang yang menghutang. Maka upaya yang sudah dilakukan oleh UPTD Pasar Tradisional Kecamatan Banjarsari adalah mengadakan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada pedagang khususnya kepada pedagang baru, memaksimalkan biaya retribusi pasar untuk pengadaan sarana dan prasarana baik untuk menunjang retribusi pasar seperti komputer dan printer maupun melakukan kerjasama

dengan pihak sekolah yaitu SMK Muhammadiyah untuk menggunakan mushola dan WC bagi pengunjung atau pedagang maupun untuk siswa/siswi dan bersikap tegas kepada pedagang saat penarikan retribusi pasar dan selalu menagih kepada pedagang yang memiliki hutang retribusi pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, [e-book], diakses tanggal 5 Desember 2021, dari Aplikasi Candil.

Siahaan, Marihot Pahala. 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan*

*Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*, [e-book], diakses tanggal 5 Desember 2021, dari Aplikasi E-Library Universitas Galuh.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*, [e-book], diakses tanggal 2 Desember 2021, dari Aplikasi Candil.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.